

TAJUK RENCANA

Menuju Era Kendaraan Listrik

ERA mobil dan sepeda motor listrik, tak lama lagi akan segera terjadi di Indonesia, era yang digadang-gadang Pemerintah Indonesia. Mengapa serba listrik? Karena mendatang kita tidak akan bergantung kepada BBM yang harganya sering fluktuatif dan ada ketergantungan pada situasi dunia.

Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle), sebagai Kendaraan Dinas Operasional juga bagi Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, era serba listrik ini dalam hitungan kasar akan lebih hemat bagi penggunaannya. Lebih irit, untuk biaya operasional pengguna sepeda motor listrik bisa hemat Rp 1 juta - Rp 1,5 juta pertahunnya (KR 17/10). Dengan asumsi masyarakat menggunakan BBM sekitar 6 liter tiap minggunya.

Memang semakin banyak pengguna kendaraan listrik, akan menyehatkan bumi dari polusi udara. Selain itu akan membantu mengurangi anggaran subsidi energi BBM yang mencapai Rp 502 triliun. Diharapkan sepeda motor listrik, sebagai pemicu percepatan transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik. Bahkan pemerintah sudah menargetkan, sampai 2025 sudah ada dua juta sepeda motor.

Gayung bersambut. Kementerian Keuangan kemudian memastikan penggantian kendaraan dinas ke mobil listrik. Semuanya akan dilakukan secara bertahap bergantung usia kendaraan. Data Kemenkeu, sekarang ini total kendaraan dinas pemerintah ada 189.803 unit. Pergantian akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan, harus memperhatikan standar barang sesuai kebutuhannya (SBSK).

Program membangun ekosistem

tem kendaraan listrik tersebut, adalah salah satu inisiatif Pemerintah di Kementerian Badan Usaha Miiik Negara (BUMN), untuk bisa melakukan transisi energi. Untuk mempercepat tersebut, kini pemerintah mendorong bagi pihak yang berminat terhadap pembangunan ekosistem Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Pembangunan SPBKLU tersebut diharapkan bakal mempercepat ekosistem kendaraan listrik, yang nantinya akan membuat pengguna kendaraan listrik nyaman untuk pengisian kendaraan listriknya. Ada 3 pilihan yang disiapkan bagi SPKLU, yakni mulai dari *medium charging*, *fast charging* dan *ultra fast charging*.

Untuk memulai pelaksanaan operasional, akan dimulai pada pelaksanaan KTT G20. Yakni akan digunakan kendaraan listrik 936 unit mobil listrik, 30 unit mobil bus listrik, serta 290 sepeda motor listrik selama kegiatan di Nusa Dua Bali. Kini dalam proses penyediaan 66 SPKLU. Seiring dengan persiapan produksi menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada 3 hal yang diperlukan. Yakni memperbanyak SPKLU atau tempat pergantian baterai yang cepat dan mudah, hingga kualitas mesin kendaraan listrik.

Masuk ke ranah mobil listrik, tentu masih banyak yang musti dibenahi selain yang disebutkan. Mulai dari ribuan kendaraan dinas yang akan diganti, maka mobil yang lama untuk apa? Padahal ribuan jumlahnya. Jadi harus bertahap. Selama ini dalam aturan, tidak ada mengenai mobil listrik. Sehingga, harus ada aturan tambahan yang memasukkan standar perhitungan jenis mobil listrik yang bisa dan tepat digunakan sebagai kendaraan dinas.

Belum lagi harus diperhitungkan, saat ini mobil dinas listrik harganya masih mahal. Harga mobil mumi sekitar Rp 600 jutaan. Sedangkan daya beli masyarakat Indonesia untuk mobil masih di bawah Rp 300 jutaan. (***)-d

PENDAFTARAN Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini menjadi ikon Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mengapa? Karena saat ini hampir semua energi dan sumberdaya Kementerian ATR/BPN dikerahkan untuk menyelesaikan PTSL. Mengapa? Karena kepastian hak atas tanah sekaligus perlindungan hukumnya menjadi kebutuhan warga negara baik perorangan, badan hukum maupun masyarakat hukum adat.

Di samping itu, perintah pendaftaran tanah sudah diamanahkan sejak terbitnya UUPA tahun 1960. Pasal 19 UUPA menyatakan "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia". Penjelasan Pasal 19 menegaskan bahwa "Pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan". Amanah pendaftaran tanah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga rakyat pemegang hak juga berkewajiban untuk menjalankannya.

Secara Serentak

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini produk PTSL tidak harus berupa sertipikat, sebagaimana banyak dipahami khalayak, tetapi berupa 4 (empat) produk. Yakni: (1) K1, bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat; (2) K2, bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat namun terdapat perkara dan/atau sengketa; (3) K3, bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikatnya karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan; dan (4) K4, bidang tanah yang objek dan subjeknya su-



KR-JOKO SANTOSO

Sutaryono

dah terdaftar dan sudah bersertipikat. Amanah UUPA dan perintah presiden dalam percepatan pendaftaran tanah direpson secara cepat oleh Menteri beserta segenap jajaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan kampus. Mengingat begitu kompleksnya per-

masalah yang dihadapi. Dalam seminar memeringati '62 Tahun UUPA' Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Menteri memerintahkan segenap jajaran Kementerian ATR/BPN dan mengajak kepada semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menuntaskan PTSL.

Tahun 2025 ditargetkan 126 juta bidang yang ada di seluruh Indonesia dapat diselesaikan pendaftarannya. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa PTSL yang sudah dimulai sejak 2017 hingga akhir tahun 2021 telah menghasilkan total bidang tanah terdaftar sejumlah 94,2 Juta (74,8%) dan total bidang tanah bersertipikat sejumlah 79,4 Juta (63 %).

Kendala

Dalam proses penyelenggaraan PTSL

Membangun Ketangguhan Menghadapi Bencana

M Taufiq AR

bencana, (5) pembangunan, pemberdayaan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan wisata belum secara komprehensif mempertimbangkan aspek risiko bencana, (6) perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal, (7) data kebencanaan belum terkonsolidasi dan terintegrasi, dan (8) belum cukup padu dan solid kolaborasi parapihak dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Strategi dan Aksi

Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2022-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang" (Perpres 87/2020). Strategi yang perlu ditempuh antara lain adalah: (1) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, (2) memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

(3) Akselerasi pemenuhan hak-hak dasar warga, perluasan aksesibilitas pelayanan dasar dan perekonomian warga. (4) melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan berbasis *blue and green infrastructure*, (5) penguatan pengelolaan risiko bencana berbasis desa dan padukuhan, (6) peningkatan investasi pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas pada wilayah prioritas pembangunan berisiko tinggi, (7) penguatan tata kelola pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan, (8) konsolidasi dan integrasi data

ditemui banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Prof/Maria SW Sumardjono selaku Penasehat Utama Menteri ATR/BPN dan Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, merumuskan berbagai hambatan dan rekomendasi penyelesaiannya. Meliputi: (1) teknis-yuridis; (2) tata kelola, dan (3) sosial-budaya. Apabila tidak diantisipasi dan diatasi berpotensi menghasilkan produk PTSL yang kurang menjamin kepastian hukum.

Hambatan teknis-yuridis dicoba diatasi melalui penguatan pengumpulan data pertanahan khususnya data yuridis dengan melakukan verifikasi secara teliti. Hambatan terkait tatakelola diatasi dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang hasilnya ditindaklanjuti bersama melalui koordinasi internal pada Kementerian ATR/BPN, antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L lain. Hambatan sosial-budaya diatasi dengan membangun kesadaran.

Agenda PTSL adalah agenda bersama yang membutuhkan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan yang terkait. Dengan penguatan dan kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. □-d

***)Dr Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

kebencanaan dalam tata kelola satu data bencana Indonesia, (9) pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam agenda-agenda tematik dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Agenda praktis perlu dilakukan. Di antaranya adalah pengetahuan perizinan pemanfaatan ruang secara transparan dan akuntabel, penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) secara selaras dan konsisten. Termasuk pengawasan, *reward and punishment* atas kepatuhan pemanfaatan ruang, internalisasi budaya sadar lingkungan (merti dusun/desa, merti kali, grebeg sampah, jaga warga, dll), hingga perencanaan pembangunan yang berbasis ekosistem dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. □-d

***) M Taufiq AR, perencana di Bappeda DIY dan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY.**

Pojok KR

Jelang Pemilu, Kemenkominfo jaga ruang digital.

-- Ketimbang dikuasai hacker, bisa merusak tatanan.

Sidang Ferdy Sambo dimulai. -- Harus diawasi semua agar jalannya sidang lancar, jangan ada gangguan.

Lagi, di Bantul 3 orang meninggal gara-gara minum oplosan.

-- Padahal sudah tahu bahayanya oplosan!

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sampah di DIY, Perlu Perhatian Serius

SAMPAH di Yogya masih menjadi persoalan serius. Data Badan Pembangunan Daerah DIY pada 3 Oktober 2022, total volume sampah di DIY mencapai angka 1.133,94 ton/hari.

Sementara itu, volume sampah yang bisa diproses dalam sistem pengelolaan sampah terpadu tempat pembuangan akhir (TPA) DIY hanya sebesar 893,53 ton/hari. Belum lagi, sampah-sampah yang dibuang ke kali atau sungai hingga hanyut dan menumpuk di hilir, yang berdampak pada masyarakat sekitar.

Tumpukan sampah di TPA Piyungan sudah melebihi batas, volume penerimaan sampah semakin naik. Kurangnya pengelolaan sampah yang baik sering menimbulkan bau tak sedap, apalagi

musim penghujan yang semakin membuat tidak sehat. Masih banyak orang juga yang membuang sampah ke sungai, jadi ketika hujan deras dapat menimbulkan banjir sampah. Jika sungai kering sampah menumpuk di pinggir kali dan menyebabkan bau yang tidak sedap.

Maka kampanye menjaga lingkungan, harus terus dilakukan. Perlu didukung 23 anak-anak dan orang muda yang tergabung dalam *Child Campaigner Yogyakarta Save the Children Indonesia* menginisiasi pentas seni bertema eGemati Bhumikui yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. □-d

Dewi Sri Sumanah,
Media dan Brand Manager
"Save the Children Indonesia."

CURAH hujan yang tinggi pada beberapa pekan terakhir telah menyebabkan sejumlah bencana di tanah air. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 150.322 jiwa terdampak bencana banjir dan longsor selama kurang waktu 3-10 Oktober 2022 di seluruh Indonesia. Di dalam tajuk berita KR (12/10), diwartakan bahwa banjir bandang melanda kawasan perbukitan Menoreh.

Bencana semakin meningkat baik intensitas maupun frekuensi kejadiannya dengan dampak yang semakin kompleks pada semua lapisan (bersifat multi sektoral). Bencana adalah masalah kemanusiaan yang kompleks yang tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja atau oleh satu dua pendekatan sektoral semata. Penanggulangan bencana secara khusus atau upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan intervensi banyak pihak yang bekerja secara kolaboratif, terkoordinasi, sinergis, dan simultan.

Mandat dan Tantangan

Mandat Kerangka Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dari *Hyogo Framework for Action (2005-2015)* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)* mendorong kepastian pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi prioritas dalam setiap pembangunan di tingkat global, nasional, regional dan daerah. Prinsip kolaborasi serta adagium dalam SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan "no one left behind" - tak ada satu pun luput tertinggal menjadi kata kunci dalam setiap proses pengurangan risiko bencana.

Terdapat beberapa tantangan dalam upaya penanggulangan bencana. Di antaranya adalah: (1) tingginya ketidakseuaian pemanfaatan ruang, (2) degradasi kualitas lingkungan hidup, (3) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang tinggi menambah faktor kerentanan pada penduduk pada ancaman bencana, (4) kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi

SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mubassada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)